Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan
Vol. 2 No. 5 (2026). pp. 358-365
ISSN: 3123-2159
DOI: https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i5.16

Evaluasi Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Regulasi dan Operasional

Hanifah, Mubayyinah, Firdausiyah, Istiana

Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; Hfah772@gmail.com (Hanifah)

Received: 15-09-2026 Revised: 17-10-2026 Accepted: 11-11-2026

How to Cite: Hanifah, H., Mubayyinah, M., Firdausiyah, F., & Istiana, I. (2026). An Evaluation of Types of Educational Financing from Regulatory and Operational Perspectives. *Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, *2*(5), 358–365. https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i5.16

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

An Evaluation of Types of Educational Financing from Regulatory and Operational Perspectives

Abstract. Educational financing is a crucial element in supporting the sustainability and quality of education. In practice, however, various issues persist—such as ambiguous classification of costs, divergent understandings among stakeholders, and a lack of full transparency and accountability in the management of educational funds—all of which affect the effectiveness of educational provision. Without adequate financial support and proper management, the educational process cannot function optimally. This study employs a literature review, analyzing various sources related to educational financing. The findings indicate that educational financing can be categorized into three primary types: (1) direct and indirect costs, (2) routine and development costs, and (3) monetary and non-monetary costs. Furthermore, under Government Regulation No. 19 of 2007, educational financing encompasses operational costs, investment costs, and personal costs. The study concludes that a comprehensive understanding of these types of educational financing, coupled with transparent and accountable management, is essential for achieving national educational goals.

Keywords: Educational Financing, Operational Costs, Investment Costs, Personal Costs, Educational Regulation

Abstrak. Pembiayaan pendidikan merupakan elemen krusial dalam menunjang keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan klasifikasi pembiayaan, perbedaan pemahaman antar pemangku kepentingan, serta pengelolaan dana pendidikan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang memadai dan pengelolaan yang tepat, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber terkait pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu: (1) biaya langsung dan tidak langsung, (2) biaya rutin dan pembangunan, serta (3) biaya moneter dan non-moneter. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007, pembiayaan pendidikan mencakup biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pembiayaan pendidikan serta pengelolaannya secara transparan dan akuntabel sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: Pembiayaan Pendidikan, Biaya Operasional, Biaya Investasi, Biaya Personal, Regulasi Pendidikan

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan kompenen penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar disekolah. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau biaya pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu kunci keberbasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas.[1] Pembiayaan operasional lembaga pendidikan berfungsi untuk memastikan bahwa entitas pendidikan beroperasi secara konsisten dan sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Sekolah harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang peran penting yang dimainkan oleh pembiayaan dalam proses pendidikan agar dapat mengelola keuangan mereka secara efektif dengan menggunakan managemen pembiayaan pendidikan.[2]

Berdasarkan Teori Evaluasi Kebijakan, Terdapat 6 indikator yang harus dipertimbangakn dalam penerapan kebijakan tersebut, analisa hasil dapat diuraikan

[1] Siti Nurhalimah, KONSEP DAN JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN CONCEPTS AND TYPES OF COSTS EDUCATION, Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam h: 2

[2] Putri Amanati, Adinda Siti Mukhlisa, Yayat Suharyat, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Issue 1, Februari 2024 H:2

dengan pendekatan teori evalusia kebijakan. Efektifitas kebijakan berkaitan dengan standar satuan biaya oprasional, penetapan biaya uang kuliah tunggal, dan kebijakan iuran pengembangan institusi, berkembangnya zaman membuat biaya oprasional perguruan tinggi semakin mengalami peningkatan, untuk mencapai ketertinggalan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dengan terus mennigkatkan mutu dan pengembangan melalu sarana prasarana dan kpeningkatan kualitas SDM.

Biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Masyarakat khususnya calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri akan melihat kondisi keuangan yang dimiliki untuk di sesuaikan dengan daya pembiayaan utnuk bisa mengkases pendiddikan di perguruan tinggi negeri. Biaya yang tidak merata antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, membuat kesulitan bagi banyak mahasiswa. Dikalangan mahasiswa untuk bisa merealisasikan pendidikan nya di perguruan tinggi negeri banyak diantra mereka melakukan pinjaman online untuk bisa membayar pendidikannya.[3]

Menurut Levin (1987) pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.[4]

Hasil peneltian terdahulu juga disebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat perlu evaluasi dan perhitungan guna mengefisienkan pengelolaannya sehingga keuntungan dari pendidikan tersebut dapat maksimal. Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan.[5] Dalam hal ini dijelaskan oleh Fattah bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah Dasar dan proses pembelajaran serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan menjadi tidak bermutu. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di berbagai lembaga pendidikan baik yang berada pada formal maupun non formal, baik yang berstatus negeri maupun swasta.[6]

Hal ini sesuai Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang pengelolaannya dengan standar pembiayaan yang sangat minim.

---

[3] Ramadhan Maruta Pradana, Amin Fauzi, Budiyanto , Mufarrihul Hazin.Analisis Kebijakan Standar Operasional Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang Berdampak pada Rencana Kenaikan Uang Kuliah Tunggal,Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 2 Mei 2025 H: 6

[4] Siti nur Halimah, konsep jenis pembiayaan pendidikan KONSEP DAN JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN CONCEPTS AND TYPES OF COSTS EDUCATION, Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam h: 2

[5] Atika Mujahidah, Alfira Okta Mayangsari, Mala Nur Kumairo, Analisis Otonomi Dan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License Volume 4, Nomor 3, Mei 2024; 1959-1976 H: 3

[6] *Mesiono, Haidir* Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan), Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember 2020 H: 2

Dan ditambah lagi para pengelola pendidikan tidak jujur mendistribusikan seluruh bantuan untuk pengelolaan pendidikan tersebut. Seperti adanya dana BOS yang tidak dimaksimalkan sesuai dengan standar yang berlaku, penyalahguanaan dana bantuan, dan bahkan terjadinya penyelewengan dan korupsi dana BOS yang seharusnya bisa diberdayakan secara maksimal.[7]

Maka perlu kita telaah bersama Evaluasi ini ingin mengetahui apakah sistem pembiayaan pendidikan yang ada tidak hanya legal menurut aturan, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam pelaksanaannya Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua model pembiayaan dapat benar-benar mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka (library research), yaitudengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut[8] Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengulas topik yang sama. Data akan diperoleh melalui studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menggali wawasan yang mendalam dan menyusun informasi yang relevan dalam konteks penelitian saat ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau program yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun instansi.Pembiayaan merupakan proses alokasi sumber daya pada kegiatan atau program tertentu. Sehingga pembiayaan pendidikan merupakan proses alokasi sumber daya untuk kegiatan atau program operasional pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat.[9]

Pembiayaan pendidikan Juga menjadi faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun Pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tetapi tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi maka Pendidikan yang berkualitas hanya dalam angan-angan saja.[10]Adapun jenis pembiayaan pendidikan adalah menjelaskan tentang beberapa jenis biaya yang

[7] Ibid: 3

[8] Adlini, Nina, M., & Dkk. (2022). Motode penelitian kualitatif studi pustaka. Jurnal EDUMASPUL, 6(1).

[9] Nadhifa Ardiana Maharani et al., "Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, vol.2, no. 3 (24 May 2024), 4.

[10]Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010), 5.

dikeluarkan untuk proses berjalannya pembelajaran dalam pendidikan, baik berupa uang, atau sumber daya rill yang digunakan dalam proses pendidikan seperti: waktu guru atau dosen, waktu murid, buku, material, gedung dan lain-lain.[11]

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya di tentukan oleh sumber daya manusia saja, melainkan juga di tentukan oleh pembiayaan pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat. Jika pembiayaan pendidikan hanya berasal dari salah satupihak saja maka pendidikan yang berlangsung tidak optimal. Karena pendidikan yang berkualitas membutuhkan biaya yang tinggi.

Jadi, pembiayaan pendidikan dapat berupa uang atau sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan serta biaya memiliki peran dan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun biaya bukanlah syarat utama untuk menghasilkan keberhasilan sebuah pendidikan. Dan pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat.[12]

Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis:

1) Biaya Langsung (Direct Cost) dan Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost).

a. Biaya langsung mencakup biaya-biaya seperti gaji guru, biaya transportasi, dan pengadaan fasilitas pembelajaran yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan.
b. Biaya tidak langsung: biaya yang umumnya mencakup kehilangan pendapatan peserta didik karena mereka sedang menjalani pendidikan, pembebasan beban pajak karena sifat sekolah yang non-profit, pembebasan sewa perangkat sekolah yang tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan, dan penyusutan sebagai representasi penggunaan perangkat sekolah yang sudah lama dipakai

2) Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (Recurrent and Capital Cost)

a. Biaya rutin: biaya yang digunakan untuk operasional pendidikan selama satu tahun anggaran, mencakup program pengajaran, gaji guru, administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana. Biaya rutin (recurrent cost) merupakan biaya yang digunakan untuk menopang kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.[13]

---

[11] Fattah Nanang, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

[12] M. Munir dan Ida Kun Sholikhah, "Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan," *CERMIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, vol.2, no. 2 (27 May 2023), 66.

[13] Daris Susanto dan Alfi Maulia Rahma, "Jenis-Jenis Pembiayaan Untuk Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pelita Nusantara*, vol.1, no. 2 (26 July 2023), 2.

b. Biaya pembangunan: Biaya pembangunan merupakan bagian dari biaya tidak langsung yang dihitung per tempat siswa, melibatkan tempat belajar, perabotan, peralatan, dan lokasi. Biaya pembangunan (capital cost) adalah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan.[14]

3) Monetary Cost dan Non-Monetary Cost

a. Monetary cost: pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kegiatan pendidikan.

b. Non-monetary cost: pengeluaran yang tidak melibatkan uang secara langsung, seperti bahan materi, waktu, tenaga, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Dalam siklus pembiayaan pendidikan, terdapat tiga tahapan utama: perencanaan (*budgeting*), akuntansi (*accounting*), dan evaluasi (*controlling*). Perencanaan mencakup pengidentifikasian dan alokasi sumber daya, akuntansi melibatkan pencatatan dan pelaporan keuangan, sementara evaluasi yang teratur memungkinkan pembelajaran dan perbaikan, menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dengan demikian, artikel ini akan menjadi bahan rujukan bagi guru maupun akademika untuk memahami lebih detail mengenai jenis dan sumber pembiayaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional (SNP) pasal 62, disebutkan bahwa jenis pembiayaan pendidikan terbagi atas biaya operasi atau juga bisa disebut biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal.[15]

1. Biaya Operasional

Biaya operasi adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada disekolah tersebut. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan pemerintah. Biaya operasi merupakan program bantuan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang dikeluarkan setiap tahun sebagai sumber utama biaya sekolah yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa.

2. Biaya Investasi

Biaya investasi pendidikan adalah biaya yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan UU RI No 20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian investasi dan pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa investasi pendidikan adalah

[14] Ibid: 239

[15] Susanto dan Rahma, "Jenis-Jenis Pembiayaan Untuk Penyelenggaraan Pendidikan," 5.

menanam modal dalam lembaga pendidikan guna memperoleh dana pada masa mendatang sehingga sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

3. Biaya Personal

Biaya pribadi peserta didik, juga dikenal sebagai biaya personal peserta didik, adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pelajaran secara konsisten.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia tidak secara spesifik menyebutkan tentang jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut;

a) Pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah secara penuh atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
c) Pemerintah dapat memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
d) Perguruan tinggi dapat memungut biaya pendidikan dari mahasiswa. Akan tetapi, biaya tersebut harus wajar dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, atau lembaga perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga program bagi siswa yang berprestasi atau memerlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.[16]

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Tanpa adanya pendanaan yang memadai, proses pendidikan akan sulit berjalan dengan optimal, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta orang tua dan masyarakat secara luas agar tercipta pemerataan dan mutu pendidikan yang lebih baik.

Jenis-jenis pembiayaan pendidikan mencakup biaya langsung dan tidak langsung, biaya rutin dan pembangunan, serta biaya moneter dan non-moneter. Selain itu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan pendidikan juga meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Ketiganya saling terkait dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan pengelolaan pembiayaan yang transparan, tepat sasaran, dan akuntabel, maka pendidikan yang berkualitas dapat terwujud serta mampu meningkatkan daya saing bangsa di era global.

[16] Ibid:6

DAFTAR PUSTAKA

Nurhalimah,Siti, KONSEP DAN JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN CONCEPTS AND TYPES OF COSTS EDUCATION, Management Of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam H: 2

Amanati Putri, Siti Mukhlisa Adinda, Suharyat Yayat, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Issue 1, Februari 2024 H:2

Maruta Pradana Ramadhan, Fauzi Amin , Budiyanto , Hazin Mufarrihul.Analisis Kebijakan Standar Operasional Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia Yang Berdampak Pada Rencana Kenaikan Uang Kuliah Tunggal,Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 2 Mei 2025 H: 6

Nur Halimah Siti, Konsep Jenis Pembiayaan Pendidikan KONSEP DAN JENIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN CONCEPTS AND TYPES OF COSTS EDUCATION, Management Of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam H: 2

Mujahidah Atika, Okta Mayangsari Alfira, Nur Kumairo Mala, Analisis Otonomi Dan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Tsaqofah Is Licensed Under A Creative Commons Attribution-Noncommercial-Sharealike 4.0 International License Volume 4, Nomor 3, Mei 2024; 1959-1976 H: 3

Mesiono, Haidir Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan), Hikmah, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember 2020 H: 2

Adlini, Nina, M., & Dkk. (2022). Motode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Jurnal EDUMASPUL, 6(1).

Nadhifa Ardiana Maharani Et Al., "Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, Vol.2, No. 3 (24 May 2024), 4.

Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010), 5.

Nanang Fattah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

Munir M. Dan Kun Sholikhah Ida, "Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan," *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, Vol.2, No. 2 (27 May 2023), 66.

Susanto Daris Dan Maulia Rahma Alfi, "Jenis-Jenis Pembiayaan Untuk Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pelita Nusantara*, Vol.1, No. 2 (26 July 2023), 2.